



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

20 – 21 April 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

21 / 04 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Rabu, 20 April 2022</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/20/141735921/sebelum-mengajukan-kpr-bp2bt-ketahui-kriteria-rumahnya?page=all</p> <p>Sebelum Mengajukan KPR BP2BT, Ketahui Kriteria Rumahnya</p> <p>-</p> <p>Tidak semua tipe rumah bisa mendapat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dengan kata lain, terdapat kriteria rumah tertentu yang bisa diajukan untuk dapat memanfaatkan salah satu program KPR bersubsidi ini. Program ini disalurkan berupa dana BP2BT. Yakni bantuan pemerintah yang diberikan satu kali kepada MBR yang memenuhi persyaratan. Besaran dana BP2BT yang akan diperoleh berkisar Rp 32 juta sampai Rp 40 juta. Baik itu untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun, maupun pembangunan rumah swadaya.</p>	+
2	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Rabu, 20 April 2022</p> <p>https://www.idxchannel.com/economics/ada-39-proyek-dengan-skema-kpbu-pupr-nilainya-rp571-triliun</p> <p>Ada 39 Proyek dengan Skema KPBU, PUPR: Nilainya Rp571 Triliun</p> <p>Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Herry Trisaputra</p> <p>Pemerintah tengah menggencarkan untuk mencari sumber pendanaan baru selain APBN untuk sebuah pembangunan. Salah satunya adalah dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Hingga saat ini PUPR sendiri setidaknya sudah memiliki 39 Proyek dengan skema pembiayaan KPBU. Proyek yang dilakukan kerjasama dengan pihak swasta itu memiliki total nilai investasi sebesar Rp571 triliun. Meski demikian menurut saat hal tersebut tidak bisa dilakukannya oleh satu pihak saja, namun perlu berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.</p>	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

21 / 04 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

3	TANGGAL MEDIA	Rabu, 20 April 2022 https://ekbis.sindonews.com/read/748765/34/indonesia-butuh-rp2085-triliun-untuk-mengejar-ketertinggalan-infrastruktur-1650441861	+
	JUDUL	Indonesia Butuh Rp2.085 Triliun untuk Mengejar Ketertinggalan Infrastruktur	
	NARASUMBER	Dirjen (Direktur Jendral) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agus Sulaiman	
	RESUME	Dirjen (Direktur Jendral) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agus Sulaiman mengatakan, berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) yang ada tercatat sekitar Rp623 triliun untuk melaksanakan pembangunan proyek. Tapi sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain, itu kita butuh anggaran hampir Rp2.085 triliun.	
4	TANGGAL MEDIA	Rabu, 20 April 2022 https://www.idxchannel.com/economics/kejar-ketertinggalan-infrastruktur-indonesia-butuh-rp2085-triliun	+
	JUDUL	Kejar Ketertinggalan Infrastruktur, Indonesia Butuh Rp2.085 Triliun	
	NARASUMBER	Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agus Sulaiman	
	RESUME	Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agus Sulaiman, mengatakan bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang ada tercatat sekitar Rp623 triliun anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan proyek. Tapi sebenarnya kalau untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain, dibutuhkan anggaran hampir Rp2.085 triliun. Jadi memang sebanyak itu kebutuhan anggaran di lingkungan (Kementerian PUPR).	



20 / 04 / 2022

| Sumber: kompas.com

Sebelum Mengajukan KPR BP2BT, Ketahui Kriteria Rumahnya

Penulis: Muhdany Yusuf Laksono

Editor: Muhdany Yusuf Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak semua tipe rumah bisa mendapat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Dengan kata lain, terdapat kriteria rumah tertentu yang bisa diajukan untuk dapat memanfaatkan salah satu program KPR bersubsidi ini.

Mengutip informasi dari laman resmi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah mempunyai tabungan.

Baik itu untuk memenuhi sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Program ini disalurkan berupa dana BP2BT. Yakni bantuan pemerintah yang diberikan satu kali kepada MBR yang memenuhi persyaratan.

Besaran dana BP2BT yang akan diperoleh berkisar Rp 32 juta sampai Rp 40 juta. Baik itu untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun, maupun pembangunan rumah swadaya.

Untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun, besaran dana BP2BT menyesuaikan penghasilan calon penerima setiap bulan.

Sedangkan untuk pembangunan atau perbaikan rumah swadaya ditentukan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB).

Lantas, seperti apa kriteria rumah KPR BP2BT?

Melansir dari unggahan akun Instagram Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berikut tipe dan kriteria rumah yang dipersyaratkan:

Rumah Tapak dan Rumah Susun

- Luas lantai 21-36 meter persegi
- Khusus rumah tapak Luas tanah 60-200 meter persegi
- Rumah baru siap huni (dibangun pengembang)
- Memenuhi persyaratan teknis keselamatan, Keamanan, keandalan, dan kenyamanan
- Dilengkapi jaringan distribusi air bersih, utilitas jaringan listrik, jalan dan drainase lingkungan, serta sarana pewadahan sampah.



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

20 / 04 / 2022

Sumber: [kompas.com](https://www.kompas.com)

Rumah Swadaya

- Luas lantai $36 < LL < 48$ meter persegi
- Luas tanah < 200 meter persegi
- Untuk pembangunan rumah swadaya:
 - a. Pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang
 - b. Pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total.
- Untuk perbaikan rumah swadaya:
 - a. Perbaikan struktural;
 - b. Perbaikan non struktural; dan atau

c. Perluasan bangunan.

- Dibangun di atas tanah dengan alas hak yang sah (SHM)
- Dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Lokasi lahan dapat terhubung jaringan distribusi air bersih, utilitas listrik, jalan lingkungan, dan drainase lingkungan
- Memenuhi persyaratan rencana teknis bangunan.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/20/141735921/sebelum-mengajukan-kpr-bp2bt-ketahui-kriteria-rumahnya?page=all>



20 / 04 / 2022

Sumber: idxchannel.com

Ada 39 Proyek dengan Skema KPBU, PUPR: Nilainya Rp571 Triliun

Author: Iqbal Dwi Purnama

IDXChannel - Pemerintah tengah menggencarkan untuk mencari sumber pendanaan baru selain **APBN** untuk sebuah **pembangunan**. Salah satunya adalah dengan skema **KPBU** (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).

Dirjen **Pembiayaan Infrastruktur** Kementerian **PUPR** (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Herry Trisaputra mengatakan hingga saat ini PUPR sendiri setidaknya sudah memiliki 39 Proyek dengan skema pembiayaan KPBU.

Proyek yang dilakukan kerjasama dengan pihak swasta itu memiliki total nilai investasi sebesar Rp571 triliun. Meski demikian menurut saat hal tersebut tidak bisa dilakukannya oleh satu pihak saja, namun perlu berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.

"KPBU itu tapi tidak bisa berdiri sendiri, kita perlu kolaborasi dan sinergi dengan kementerian lain, seperti kementerian keuangan, bappenas bkpm," ujarnya dalam Market Review IDXChanel, Rabu (20/4/2022).

Herry menjelaskan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh swasta ketika menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini skema KPBU. Sebab memang menurut Herry

skema terdapat tengah difokuskan sebagai pembiayaan alternatif.

"Nah switchence itu banyak sekali yang bisa didapatkan, mulai dari pemberian tax holiday, kemudian penetapan daftar positif Investasi, misalnya masuk dalam proyek Strategis Nasional itu pengadaannya akan kita ubah LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara)," sambung Herry.

Selain itu menurutnya juga akan ada penjamin dari PT PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia). Adapun skema KPBU itu sendiri Herry menjelaskan berbeda dengan kerjasama konvensional, yang mana ketika ada proyek langsung dilelangkan kemudian dilepas oleh pemenang lelang.

Sedangkan kalau KPBU itu pihak swasta yang bekerja sama akan diberikan masa konsesi, yang mana selama masa itu swasta diberikan keleluasaan untuk mengelola, mengoperasikan, hingga memelihara proyek tersebut.

"Nanti setelah masa konsesi, itu tetap menjadi BMN (Barang Milik Negara) pemerintah," pungkas Herry.

<https://www.idxchannel.com/economics/ada-39-proyek-dengan-skema-kpbu-pupr-nilainya-rp571-triliun>



20 / 04 / 2022

Sumber: sindonews.com

Indonesia Butuh Rp2.085 Triliun untuk Mengejar Ketertinggalan Infrastruktur

Author: Iqbal Dwi Purnama

JAKARTA - Infrastruktur di Indonesia masih tertinggal apabila disandingkan dengan negara-negara maju di belahan dunia. Maka untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia membutuhkan ribuan triliun untuk mendanai proyek infrastruktur.

Dirjen (Direktur Jendral) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agus Sulaiman mengatakan, berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) yang ada tercatat sekitar Rp623 triliun untuk melaksanakan pembangunan proyek.

"Tapi sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain, itu kita butuh anggaran hampir Rp2.085 triliun," ujar Iwan dalam Market Review IDXChanel, Kamis (20/4/2022).

"Jadi memang sebanyak itu kebutuhan anggaran yang di lingkungan kementerian PUPR," sambungnya.

Iwan mengatakan, dari anggaran yang ada dengan anggaran yang dibutuhkan terjadi funding gap yang besar jika hendak mengejar ketertinggalannya infrastruktur dari negara negara maju. "Hampir sekitar Rp1.400 triliun (funding gap)," kata Iwan.

Oleh karena itu saat ini Iwan menjelaskan para Dirjen di lingkungan Kementerian PUPR diamanatkan untuk mencari sumber pembiayaan yang kreatif atau creative financing.

"Salah satunya dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), kalau untuk rumah ada FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," pungkasnya.

<https://ekbis.sindonews.com/read/748765/34/indonesia-butuh-rp2085-triliun-untuk-mengejar-ketertinggalan-infrastruktur-1650441861>



20 / 04 / 2022

Sumber: idxchannel.com

Kejar Ketertinggalan Infrastruktur, Indonesia Butuh Rp2.085 Triliun

Author: Iqbal Dwi Purnama

IDXChannel - Salah satu program yang menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo bahkan sejak masa kampanye pertamanya pada Pemilu 2014 lalu adalah pembangunan infrastruktur. Pilihan arah kebijakan itu tidak lepas dari kesadaran bahwa kondisi infrastruktur di Indonesia masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara maju lain di dunia.

Penyebab utama dari ketertinggalan tersebut tentu terkait ketersediaan dana untuk pembangunan. Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agus Sulaiman, mengatakan bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang ada tercatat sekitar Rp623 triliun anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan proyek.

"Tapi sebenarnya kalau untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain, dibutuhkan anggaran hampir Rp2.085 triliun. Jadi memang sebanyak itu kebutuhan anggaran di lingkungan (Kementerian PUPR)," ujarnya, dalam

Market Review IDXChanel, Rabu (20/4/2022).

Dari anggaran yang ada dengan anggaran yang dibutuhkan tersebut, dijelaskannya, terjadi funding gap yang besar jika ingin mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju terkait masalah infrastruktur.

"Hampir sekitar Rp1.400 triliun (funding gap)," katanya.

Oleh karena itu saat ini Iwan menjelaskan para Dirjen di lingkungan Kementerian PUPR diamanatkan untuk mencari sumber pembiayaan yang kreatif atau creative financing.

"Salah satunya dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), kalau untuk rumah ada FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," pungkasnya. (TSA)

<https://www.idxchannel.com/economics/kejar-ketertinggalan-infrastruktur-indonesia-butuh-rp2085-triliun>